

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Optimalkan Retribusi Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan



Sumber gambar:

<https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/225577/rekomendasi-kpk-dinas-esdm-kalsel-optimalkan-retribusi-tambang>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan retribusi pajak daerah untuk IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Selatan.

Hal ini berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya dilaksanakan Rapat Koordinasi penataan perizinan sektor tambang khususnya MBLB.

Yakni bahwa Pemprov Kalsel memiliki 9 rekomendasi dari KPK untuk meningkatkan perekonomian daerah.

“Kami dari Pemprov Kalsel telah melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan oleh KPK,” tuturnya, Banjarbaru, Kamis (10/7/2024).

Ia mengungkapkan salah satu rekomendasi dari pihak KPK ialah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan membentuk tim. Saat ini, Pemprov Kalsel telah membentuk tim terpadu penataan pengelolaan usaha pertambangan MBLB dgn SK Gubernur Kalsel tertanggal 22 November 2023.

Gayatrie menerangkan, dalam tim tersebut banyak SKPD yang ikut berkontribusi dalam menindaklanjuti penataan MBLB di Kalsel.

“Saat ini total perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebanyak 130 perusahaan,” katanya.

Dengan seluruh rekomendasi KPK yang telah dilaksanakan, maka Pemprov Kalsel berupaya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar bisa terus memaksimalkan retribusi pajak daerah yang didapat dari IUP MBLB.

“Seluruh rekomendasi akan terus di laksanakan agar perusahaan perusahaan tambang yang ada di Kalsel dapat mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/225577/rekomendasi-kpk-dinas-esdm-kalsel-optimalkan-retribusi-tambang>, 10 Juli 2024.
2. <https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdjI6ImRwNWwh6dkxhZm1QcjhzaHZhMmw5b1E9PSIsInZhbHVlIjoidWs0QjZqRWtMdThNTWVYRHBpWnljdz09liwibWFjIjoiYjU0NjNjMGI0NmI2NDgzOGNjYTc1Y2YzYTc0ZjA4ODQ0MGRIMDY5MzNjNzI0OTdmMjU2MzM3NDU3OGRjNmE2MiJ9>, 11 Juli 2024.

Catatan:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.¹ IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.² Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.³

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin

¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)

² Ibid, Pasal 1 ayat (7)

³ Ibid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.⁴

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.⁵ Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.⁶

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.⁷

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:⁸

- a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
- b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
- e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
- f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:⁹

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

⁴ Ibid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

⁵ Ibid, Pasal 100 Ayat 1

⁶ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI huruf B angka 13

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

⁸ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

⁹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)

- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
- d. denda administratif; dan
- e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa:

- a. bagian pemerintah pusat sebesar 40% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara;
- b. biaya pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;